



Jurnal Riset Akuntansi aksioma

ISSN 1858-0785

Volume 12, No. 2, Desember 2013

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGARUH PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA
INDIVIDUAL (Studi Pada Sekretariat Daerah Kota
Mataram)

*Nina Karina Karim
Bq. Anggun Hilendri L.*

PENGARUH HUTANG, UKURAN PERUSAHAAN,
KESEMPATAN BERTUMBUH DAN *RETURN SPREAD*
TERHADAP LIKUIDITAS

Siti Atikah

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESULITAN
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PADA SKPD SE-PULAU LOMBOK

*Rika Fatmawati
Sapto Hendri BS
Bq. Rosyida Dwi A.*

PENGARUH MANAJEMEN LABA RILL, UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN

Zuhrotul Isnaini

PAJAK AGRESIF DAN *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (CSR)* : PENGUJIAN TEORI LEGITIMASI

*Susi Retna C.
Rahmi Sri Ramadhani*

CORPORATE GOVERNANCE DAN *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY*

*Kusmawati
Desy Lesmana*

DETERMINAN NILAI TAK BERWUJUD PERUSAHAAN DAN
ADOPSI PENUH IFRS DI INDONESIA DAN MALAYSIA

*Elin Erlina Sasanti
Erna Widiastuty
Alamsyah*



Pusat Kajian dan Pengembangan Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MATARAM

Jurnal Riset Akuntansi **aksioma**

Head of Publishing

Sapto Hendri BS.

Editor in Chief

Saipul AM

Managing Editors

Lilik Handayani	Alamsyah
Animah	Khaerunnas
Susi Retno	Herlina Pusparini
Nina Karina Karim	Siti Atikah

Editorial Secretary

Wirawan Suhaedi Elin Erlina Sasanti

Layout & Production

Lukman Effendi L. Takdir Jumaidi

Marketing & Distribution

Ayudia Sokarina Eni Indriani
Nur Fitriyah

Editor Boards:

Dr. Memed Sueb, SE, M.Si., Ak. (Universitas Padjajaran)
Dr. Felix Suwanto, M.Si. (Universitas Atmajaya Yogyakarta)
Dr. Efrizal, M.Si., Ak. (Universitas Diponegoro)
Dr. A. Mattulada Amir, SE., M.Si. (Universitas Tadulako)
Drs. M. Natsir, M.Si., Ak (Universitas Hasanudin)
Dra. Dianasari, M.Si., Ak. (Universitas Widyatama)
Dr. Asbudin, SE., M.Si., Ak. (Universitas Halu Uleo)
Dr. A. Rifai (Universitas Mataram)
Dr. Akram, SE, M.Si (Universitas Mataram)

Publisher & Redaction Address:

Gedung Fakultas Ekonomi UNRAM
Jurusan Akuntanasi Jl. Majapahit 64
Telp 0370 620508. Fax. 0370 620508
Email : aksiomapkpa@yahoo.com.

Printed by:

Percetakan Damar Sakti
Jl. Amir Hamzah - Mataram

DAFTAR ISI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA INDIVIDUAL (Studi Pada Sekretariat Daerah Kota Mataram) <i>Nina Karina Karim, Bq. Anggun Hilendri Sasanti</i>	1
PENGARUH HUTANG, UKURAN PERUSAHAAN, KESEMPATAN BERTUMBUH DAN RETURN SPREAD TERHADAP LIKUIDITAS <i>Siti Atikah.....</i>	18
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESULITAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA SKPD SE-PULAU LOMBOK <i>Rika Fatmawati, Sapto Hendri BS, Bq. Rosyida Dwi Astuti</i>	29
PENGARUH MANAJEMEN LABA RILL, UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN <i>Zuhrotul Isnaini</i>	48
PAJAK AGRESIF DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) : PENGUJIAN TEORI LEGITIMASI <i>Susi Retna C., Rahmi Sri Ramadhan</i>	62
CORPORATE GOVERNANCE DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY <i>Kusmawati, Desy Lemana.....</i>	85
DETERMINAN NILAI TAK BERWUJUD PERUSAHAAN DAN ADOPSI PENUH IFRS DI INDONESIA DAN MALAYSIA <i>Elin Erlina Sasanti, Erna Widiastuty, Alamsyah</i>	96

CORPORATE GOVERNANCE DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Kusnawati *
Desy Lesmana *
(Dosen STIE Musi Palembang)

Abstract

The objective of this research is to empirically examine the impact of Good Corporate Governance toward Corporate Social Responsibility. This research has benefit for manager in corporate social responsibility activity. Purposive sampling method is used to select sampel which consisted of companies listed in Indonesian Stock Exchange during 2009-2011. Data in this research are secondary data collected based on documentation method. Hypotheses testing based on multiple linear regression show that elements of Good Corporate Governance have significant impact on corporate social responsibility. Those elements are independent commissioner and audit committee. Meanwhile foreign ownership was found to have no significant influence on corporate social responsibility.

Keywords: *good corporate governance, independent commissioner, audit committee, foreign ownership, corporate social responsibility*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Penelitian

Teori pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*, menjadi pemicu munculnya keberadaan *Corporate Governance* sebagai alat pengawasan kegiatan. Konsep *Corporate Governance* diperkuat dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor:Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara. Organisasi dunia seperti Bank Dunia dan *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) berpartisipasi dalam mengembangkan konsep-konsep *Corporate Governance*.

Pemangku kepentingan (*stakeholder*) suatu perusahaan tidak hanya terbatas pada investor akan tetapi juga kelompok-kelompok lain seperti masyarakat. Di satu sisi perusahaan menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat, namun di sisi lain tidak jarang masyarakat mendapatkan dampak buruk dari aktivitas bisnis perusahaan. Akibatnya banyak perusahaan yang mendapat kritik karena telah menciptakan masalah sosial dan lingkungan. Untuk itu Kesadaran tentang pentingnya mempraktikkan pertanggungjawaban sosial perusahaan (selanjutnya disingkat CSR - *Corporate Social Responsibility*) menjadi *trend* global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan *stakeholders*.

Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparansi, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang semakin bagus (*Good Corporate Governance*) semakin memaksa perusahaan

untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah mekanisme *Corporate Governance* dapat mempengaruhi pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bermanfaat, yaitu:

1. Bagi pemerintah, dapat menjadi panduan dalam menjamin terlaksananya pelaksanaan aktifitas tanggungjawab sosial perusahaan melalui pemantauan atas pelaksanaan *Corporate Governance*.
2. Bagi perusahaan, dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan agar pelaksanaan tanggungjawab sosial bagi perusahaan dapat terlaksana dengan baik.
3. Bagi peneliti, dapat memberikan informasi bahwa *Corporate Governance* dapat dijadikan salah satu factor yang dapat mempengaruhi terlaksananya tanggungjawab sosial di perusahaan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Stakeholder Theory dan Stewardship Theory

Stakeholder theory tentang pemangku kepentingan dari suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tidak beroperasi untuk kepentingan sendiri tapi juga untuk stakeholdernya. Badjuri (2011). Teori ini menjelaskan tanggungjawab perusahaan terhadap kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan atas perusahaan.

Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Teori menuntut bahwa perusahaan harus mampu memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.2. Good Corporate Governance

Corporate Governence (GCG) menurut *FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia)* dan *OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)* adalah suatu system yang mengendalikan perusahaan untuk menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Konsep "*Corporate Governance*" menurut *IICG (2008)* dalam laporan yang dikenal dengan *Cadbury Report, Good Corprote Governance* adalah seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak dan tanggungjawab mereka.

Agoes dan Ardana (2011:102) memberikan pemahaman GCG dalam bentuk luas dan sempit. Dalam bentuk luas GCG meliputi pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah, kreditor, pelanggan, masyarakat, dan kelompok lain. Dalam bentuk sempit, pengendalian perusahaan dilakukan oleh RUPS, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi. Pemahaman luas dan sempit dari GCG ini memberikan gambaran bahwa wadah dari GCG adalah organisasi perusahaan.

GCG merupakan bentuk dari mekanisme pengendalian yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, nilai tambah bagi pemangku kepentingan, mencegah penyimpangan dalam perusahaan, dan membela kepentingan

pemangku kepentingan, Tjager (2003) dan Surya dan Yustiavanda (2007).. Menurut ujiyanto (2007) mekanisme pengendalian sendiri terbagi menjadi mekanisme pengendalian eksternal oleh pasar dan mekanisme pengendalian internal oleh dewan komisaris. Mekanisme pengendalian internal didasari dengan system struktur organisasi internal yang dianut perusahaan-perusahaan di Indonesia, yaitu *system dual board (two Tiers System)*, Jeanifer dan Kusmawati (2011).

Prinsip-prinsip yang bisa digunakan dalam penerapan GCG menurut Agoes dan Ardana (2011:103) adalah perlakuan yang setara antara stakeholder (*fairness*), Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas. Ini juga sebagaimana yang dikatakan oleh menteri BUMN dalam keputusannya Nomer kep-117/M-MBU/2002 sebagaimana dikutip oleh Tjager (2003), dengan menambahkan Kewajaran dan Kemandirian.

Penerapan GCG akan lebih sempurna jika dilengkapi empat organ tambahan sebagaimana yang dikatakan oleh Surya dan Yustivananda (2006), yaitu komisaris independen, direktur independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan. Keempat organ ini merupakan pihak-pihak yang berada dalam internal perusahaan, dan ini merupakan pengertian pengendalian oleh GCG dalam arti sempit sebagaimana yang dikemukakan oleh Agoes dan Ardana (2011:102).

Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan dalam RUPS yang keputusannya berdasarkan kepemilikan saham. Untuk menghindari adanya kecenderungan dewan komisaris dan direktur yang lebih mengutamakan kepentingan pemegang saham mayoritas, maka untuk menjaga keindependenan diperlukan adanya direktur atau komisaris yang mewakili kepentingan pemegang saham minoritas. Kode etik akuntan publik menekankan independen dalam sikap mental dalam pengambilan keputusan (*independent in fact*).

Terkait dengan peranan dewan komisaris terdapat juga komite audit yang bertugas membantu dalam tugas pengawasan. Keberadaan komite audit ini muncul akibat dari semakin meningkatnya penyelewengan yang dilakukan oleh direktur dan dewan komisaris, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Surya dan Yustiavandana (2006).

Praktek Komite Audit di Indonesia dapat dibedakan atas 3 (tiga) hal sesuai dengan jenis/karakteristik perusahaan. Praktek komite audit di BUMN telah diatur dengan Undang Undang No. 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003, antara lain pada pasal 70. disebutkan bahwa Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Komite audit dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggungjawab kepada Komisaris atau Dewan Pengawas.

Komite audit di sektor publik diatur berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 yaitu jumlah anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk Ketua Komite audit. Anggota yang berasal dari komisaris hanya sebanyak 1 (satu) orang, dan harus merupakan komisaris independen. Anggota lainnya dari Komite Audit adalah berasal dari pihak eksternal yang independen, yang bukan merupakan komisaris, direksi dan karyawan perusahaan Tercatat.

Selain dewan komisaris dan komite audit, sekretaris perusahaan juga organ penting dalam penerapan GCG. Sekretaris perusahaan disini beda dengan sekretaris eksekutif perusahaan yang dikenal selama ini. Sekretaris perusahaan adalah seseorang yang bertugas sebagai penghubung (*public relation/investor relations*) antara perusahaan dan pihak diluar perusahaan. Tugas sekretaris ini adalah menyimpan dokumen perusahaan, daftar pemegang saham, risalah rapat direksi dan RUPS, dan informasin lainnya.

2.3. *Corporate Social Responsibility*

Definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang lebih komprehensif sebagaimana yang dikatakan oleh *prince of wales international business forum* lewat lima pilar, yaitu *building human capital, strengthening economies, assessing social cohesion, encouraging good governance, dan protecting the environment*. Dalam Pambudi (2006). Agoes dan Ardana (2011:83) mengatakan bahwa kegiatan bisnis yang memiliki kekuatan spiritual sebagai ibadah (*God Devotion*) yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan semua pemangku kepentingan atau masyarakat (*prosperous society*), dan mampu menjamin keléstarian lingkungan (*planet conservation*).

Stakeholder yang didalamnya terdapat investor asing terutama semakin besar perhatiannya terhadap permasalahan sosial, sehingga lebih menyukai berinvestasi pada perusahaan yang melakukan CSR dibanding perusahaan lainnya. Selain pihak-pihak yang mendukung dilaksanakannya CSR, juga ada pihak-pihak yang tidak setuju. Kondisi ini membuat pelaksanaan CSR hanya didasarkan kepada kesadaran para pelaku bisnis.

Sonny Kerap dalam Agoes dan Ardana (2011:92) menunjukkan alasan pelaku bisnis menentang program CSR, yaitu:

1. Perusahaan adalah lembaga ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan dan bukan lembaga sosial.
2. CSR akan membuat perhatian manajemen tidak focus pada penciptaan laba
3. Biaya sosial akan mengurangi laba
4. Kurangnya sumberdaya manusia yang trampil dalam menjalankan CSR

Sementara alasan yang mendukung CSR adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran bahwa masyarakat semakin kritis
2. Keterbatasan sumber daya alam
3. Penciptaan lingkungan sosial yang lebih baik
4. Pemerataan dalam memikul tanggungjawab sosial dan lingan
5. Penciptaan keuntungan jangka panjang

2.4. *Peranan Good Corporate Governance dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility*

Manfaat pelaksanaan CSR bagi keberlanjutan perusahaan di masa yang akan datang serta pelaksanaan CSR yang belum sepenuhnya, menuntut adanya pengawasan dan pengendalian untuk menjamin pelaksanaan CSR yang baik. Dewan komisaris dalam perusahaan yang menjadi syarat pelengkap untuk pelaksanaan GCG diharapkan dapat membantu pengawasan pelaksanaan CSR. Independensi yang dimiliki oleh dewan komisaris diharapkan dapat menjamin perusahaan melaksanakan CSR tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

H1: Komisaris independen bertanggungjawab sosial berpengaruh positif terhadap

Keberadaan komite audit yang merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan merupakan salah satu penilaian dalam pengimplementasian *good corporate governance*. Untuk mewujudkan Prinsip *good corporate governance*, maka prinsip independensi, transparansi dan pengungkapan, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajiban harus menjadi landasan utama bagi aktivitas komite audit.

H2: Komite Audit Berpengaruh Terhadap Corporate Social Responsibility.

Penerapan CSR dalam perusahaan merupakan masalah penting yang dapat membuat perusahaan bisa berlanjut atau tidak. Penanam modal asing dalam perusahaan di Indonesia dapat mempengaruhi berlanjut atau tidak mereka berinvestasi. Kondisi yang paling parah adalah bisa membuat perusahaan harus ditutup. Rustriani (2010). Issu tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia dapat dilihat pada banyak kasus yang kemudia berimbas terhadap di tutup perusahaan Lubis (2010:469).

H3: Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap bertanggungjawab sosial.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah studi empiris dengan menggunakan objek pelaporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria terdaftar secara berturut-turut pada tahun 2009-2011, menyajikan laporan tahunan, dan memiliki data lengkap yang dibutuhkan dalam pengolahan data.

Good Corporate Governance sebagai variabel independen dicerminkan dengan mekanisme GCG yaitu Komisaris Independen yang diukur dengan proporsi dewan komisaris independen dibandingkan jumlah seluruh anggota komisaris. Keberadaan Komite Audit, diukur dengan jumlah komite audit. Kepemilikan Asing, diukur jumlah kepemilikan saham oleh orang asing. *Corporate Sosial Responsibility* diukur dengan menggunakan jumlah pengungkapan aktifitas tanggungjawab sosial perusahaan di dalam laporan tahunan perusahaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dengan menggunakan metode dokumentasi atas laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu data diuji dengan menggunakan uji asumsi klasik yaitu multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji normalitas data, dan linieritas, Ghazali (2006:91). Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen), dengan angka korelasi yang nilainya harus kecil. Uji heterokedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk melihat terjadi atau tidaknya heterokedastisitas dapat menggunakan uji Park, yaitu dengan melihat nilai *unstandardized coefficient β* . Jika nilai β menunjukkan nilai yang tidak signifikan

berarti tidak terjadi heterokedastisitas. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Metode pengujian normalitas yang digunakan yaitu metode uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov, dengan tingkat signifikan yang harus lebih besar dari 0,05.

Selanjutnya adalah pengujian hipotesis, dengan menggunakan regresi linier berganda. Hipotesis diterima jika nilai signifikansi nilai t tidak lebih besar dari 0.05. Setelah dilakukan pengujian hipotesis, selanjutnya dapat dicari nilai *Adjusted R Square* untuk melihat apakah ada faktor lain yang mempengaruhi variabel dependen. Dan untuk membentuk persamaan hipotesis yang dihasilkan, maka digunakan nilai *unstandardize coefficient* β dari variabel independen. Adapun persamaan untuk masing-masing hipotesis adalah sebagai berikut:

$$\text{CSR} = a + b_1\text{KI} + b_2\text{KA} + b_3\text{KPA} + e$$

Di mana:

- CSR = Pengungkapan CSR
- KI = Komisaris Independen
- KA = Komite Audit
- KPA = Kepemilikan Asing

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1. Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil seleksi sampel diperoleh 69 perusahaan yang memenuhi kriteria dari 466 perusahaan. Pengurangan yang banyak dari populasi karena adanya kriteria kepemilikan asing. Bagian ini akan digambarkan atau dideskripsikan data masing-masing variabel tahun 2009, 2010 dan 2011. Data tersebut dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari masing-masing variabel.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KI	207	0,01	1,00	0,5495	0,24465
KA	207	1	7	3,16	1,218
KPA	207	0,01	0,99	0,4610	0,29453
CSR	207	0,03	0,36	0,1807	0,08600
Valid N (listwise)	207				

Sumber: Data Sekunder (diolah)

Hasil tabel 1 menunjukkan luas pengungkapan CSR yang terkecil sebesar 0,03 atau 3% dan yang terbesar sebesar 0,36 atau 36%. Nilai rata-rata variabel CSR adalah 0,1807 atau 18,07% dengan standar deviasi 0,08600 menggambarkan bahwa luas pengungkapan CSR masih relatif rendah, karena dari total 78 item pengungkapan, rata-rata yang diungkapkan oleh perusahaan hanya 14 item.

Komisaris Independen mempunyai nilai minimum sebesar 0,01 atau 1% dan nilai maksimum sebesar 1 atau 100%, serta nilai mean adalah 0,5495 atau 54,95% dengan standar deviasi sebesar 0,24465. Nilai ini menggambarkan bahwa proporsi komisaris independen sudah baik, karena dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep 315/BEJ/06-2000 perihal Peraturan No

1-A, tentang ketentuan Komisaris Independen berisi ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris.

Komite Audit menunjukkan jumlah terendah 1 dan jumlah tertinggi adalah 7 dengan rata-rata 3,16 dan standar deviasi 1,218. Nilai rata-rata menunjukkan bahwa rata-rata Komite Audit pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sudah sesuai dengan peraturan Bapepem, yaitu Komite Audit pada suatu perusahaan minimal 3 orang.

Pada variabel Kepemilikan Asing mempunyai nilai minimum sebesar 0,01 atau 1% dan nilai maksimumnya sebesar 0,99 atau 99%. Nilai mean variabel Kepemilikan Asing sebesar 46,10% dan standar deviasinya adalah 29453 menunjukkan bahwa kepemilikan asing di Indonesia tergolong tinggi. Contohnya Bank CIMB Niaga, mayoritas dimiliki oleh kepemilikan dari Singapura.

4.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Adapun hasil pengujian asumsi klasik adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Asumsi Klasik

Normalitas	Kolmogorov-Smirnov Z	1,307
	Asymp. Sig. (2-tailed)	0,066
Multikolinieritas	Correlations KA -KPA	-0,018
	KI - KPA	-0,053
	KI - KA	-0,008
Tollerance	KI	0,0997
	KA	1,00
	KPA	0,997
Autokorelasi	Test Value - Run Tes	-0,0057188
	Asymp. Sig (2-tailed)	0,236
Heterokedastisitas	Sig KI	0,783
	KA	0,082
	KPA	0,596

Sumber: Data Sekunder (Diolah)

Hasil tabel 2 diperoleh gambaran bahwa Asymp. Sig kolmogorof smirnof adalah sebesar 0,066 yang lebih besar dari 0,05, sehingga data dalam penelitian ini bisa dipastikan sudah berdistribusi normal. Hasil Uji Multikolonieritas nilai *Tolerance* 0,10 < data < 0,10 yang menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model regresi penelitian ini adalah terbebas dari multikolonieritas atau dapat dipercaya dan objektif.

Hasil pengujian run Test nilai nilai test adalah -0,0057188 dan nilai probabilita atau signifikansi adalah 0,236. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

Hasil dari pengujian Heterokedastisitas dengan menggunakan uji Park, terlihat bahwa koefisien parameter untuk variabel independen tidak ada yang signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

3.3. Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis pengaruh variabel Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Asing terhadap ttanggungjawab sosial, adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Tabel Uji Hipotesis: partial (uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.	F	Sig	R Square
	B	Std. Error					
1 (Constant)	,145	0,022	6,700	0,000			
KI	-6,025E-02	0,023	-2,599	0,010	9,168	0,000	0,119
KA	2,127E-02	0,005	4,574	0,000			
KPA	3,132E-03	0,019	,163	0,871			

Sumber: Data Sekunder (Diolah)

Tabel 3 diperoleh gambaran bahwa hipotesis pengaruh Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap CSR diterima sedangkan hipotesis pengaruh Kepemilikan Asing terhadap CSR ditolak. Hasil tabel 4.7 diperoleh juga bahwa tingkat signifikansi adalah 0,00. Angka ini lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat kesimpulan bahwa secara simultan, variabel komisaris komisaris independen dan kepemilikan asing dan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Diterimanya hipotesis pertama yaitu Komisaris Independen berpengaruh terhadap CSR mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rustiarini (2010) menghasilkan bahwa komisaris independen mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Namun arah pengaruhnya adalah negatif, artinya semakin banyak jumlah komisaris independen justru akan memperlemah CSR. Komisaris yang independen tidak tidak memiliki saham pada perusahaan sehingga orientasi pengawasan yang dilakukan adalah pada kepentingan stakeholder secara jangka pendek saja, yaitu orientasi laba. Keputusan pelaksanaan CSR secara jangka pendek akan membuat laba menjadi berkurang karena pelaksanaan CSR membutuhkan biaya diluar biaya operasional perusahaan. Meskipun CSR akan menurunkan laba secara jangka pendek akan tetapi secara jangka panjang akan meningkatkan keberlangsungan hidup perusahaan. Pemikiran tentang keberlangsungan hidup perusahaan secara jangka panjang membutuhkan orang-orang yang memiliki kaitan moril dan itu akan diperoleh jika anggota organisasi memiliki andil dalam kepemilikan saham di perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa CSR akan berlangsung baik jika

dewan komisaris memiliki kepemilikan atas perusahaan dalam bentuk kepemilikan saham.

Hipotesa kedua yaitu pengaruh Komite Audit terhadap CSR diterima dapat menjelaskan bahwa komite audit perusahaan membawa dampak pada luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hal ini sesuai dengan salah satu peranan dari komite audit yaitu meningkatkan kualitas keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas melalui peningkatan struktur pengendalian intern.

Hipotesa ketiga yaitu pengaruh Kepemilikan Asing ditolak, menjelaskan bahwa proporsi komisaris independen sebuah perusahaan tidak membawa dampak pada luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hasil ini tidak mendukung hasil penelitian Rustiarini (2010) bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, tetapi mendukung penelitian Badjuri (2011) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Kepemilikan asing tidak berpengaruh pada pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai perusahaan, artinya kepemilikan asing tidak dapat mendorong para manajer untuk meningkatkan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, dengan kata lain investor asing atau kepemilikan asing pada perusahaan Indonesia belum membawa dampak akan pentingnya pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, hal yang sama diungkapkan oleh Machmud dan Djakman (2008) dalam Waryanto (2010) bahwa investor asing atau kepemilikan asing pada perusahaan Indonesia secara umum belum memperdulikan masalah lingkungan dan sosial sebagai isu kritis yang harus secara ekstensif untuk diungkapkan dalam laporan tahunan.

Nilai adjusted R² sebesar 0,119 atau 11,9%. Hal ini berarti bahwa variable komisaris independen, kepemilikan asing dan komite audit mempengaruhi variable pengungkapan *Corporate Social Responsibility* hanya sebesar 11,9%. Sisanya, sebesar 88,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Persamaan regresi yang diperoleh dari pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

$$CSR = 0,145 - 0,0603KI + 0,02127KA + 0,00313KPA + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Konstanta 0,145 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari variable komisaris independen, kepemilikan asing, dan komite audit, maka nilai pengungkapan CSR adalah 0,145
2. Koefisien regresi variabel komisaris independen sebesar -0,0603 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai pada variabel komisaris independen akan memberikan penurunan skor sebesar -,0603.
3. Koefisien regresi variabel komite audit sebesar +0,02127 menunjukkan bahwa setiap penambahan satu nilai pada variabel komite audit akan memberikan kenaikan skor sebesar 0,02127
4. Koefisien regresi variabel kepemilikan asing sebesar +0,00313 menunjukkan bahwa setiap penambahan satu nilai pada variabel kepemilikan asing akan memberikan kenaikan skor sebesar 0,00313.

5. Simpulan Dan Saran

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: (1) Komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, namun arah pengaruhnya adalah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa CSR akan berlangsung baik jika dewan komisaris memiliki hubungan moral terhadap perusahaan berupa kepemilikan atas perusahaan dalam bentuk kepemilikan saham. (2) Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Komite Audit berpengaruh terhadap CRS, karena salah satu tugas utama komite audit adalah meningkatkan kualitas keterbukaan dan transparansi, hal ini terkait dengan ukuran variabel CSR yang digunakan, yaitu jumlah pengungkapan CSR dan (3) Kepemilikan Asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap CSR, karena investor asing atau kepemilikan asing pada perusahaan Indonesia secara umum belum memperdulikan masalah lingkungan dan sosial sebagai isu kritis yang harus secara ekstensif untuk diungkapkan dalam laporan tahunan.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian mendatang sebagai berikut:

1. Ukuran *Good Corporate Governance* (GCG) tidak hanya dilihat dari Komite Audit dan Dewan Komisaris, tetapi juga dapat dilihat dari Sekretaris Perusahaan. Untuk penelitian selanjutnya adalah menambah variabel Sekretaris Perusahaan.
2. Komite Audit pada penelitian ini diukur dari jumlah. Penelitian selanjutnya, komite audit diukur dari proporsi komite audit independen
3. Keterkaitan *Good Corporate Governance* dengan *Corporate Social Responsibility* pada penelitian ini menggunakan kepemilikan asing, pada penelitian selanjutnya, khusus untuk populasi BUMN menambahkan kepemilikan pemerintah.
4. Melakukan pengujian kepemilikan manajerial sebagai variabel pemoderasi antara *Good Corporate Governance* dengan *Corporate Social Responsibility*

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Soekrisno., dan I Cenik Ardana., *Etika Bisnis dan Profesi.*, Edisi Revisi., Salemba Empat., Jakarta., 2011.
- Badjuri, Ahmad, 2011, Factor-Faktor Fundamental, Mekanisme Corporate Governance, Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perusahaan Manufaktur Dan Sumberdaya Alam Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Keuangan Dan Perbankan Volume 3 No 1 Mei 2011.*
- Forum For Corporate Governance In Indonesia, *Peranan Dewan Komisaris Dan Komite Audit Dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan).*, [www. Cic-Fcgi.Orgnews.](http://www.Cic-Fcgi.Orgnews), Diakses 11 Maret 2011
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro., Semarang, 2006.

- Indoensian Institute For Corporate Governance., *Corporate Governance Perception Indes Mewujudkan Good Corporate Governance Sebagai Suatu Sistem*, Penerbit Iicg, , 2010. [www. IICG.Org](http://www.IICG.Org), Diakses 6 Maret 2011
- Jeanifer, Patrishia dan Kusmawati., *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan*, *Jurnal Keuangan Dan Bisnis STIE MUSI Palembang Volume 7 No 1 Maret 2009*.
- Komite Nasional Kebijakan Governance., *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia.*, 2006., www.Governance-Indonesia.Or.Id., Diakses 12 Maret 2011
- Rustriani, Ni Wayan., *Pengaruh Corporate Governance pada hubungan Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar., 2010.
- Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana., *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha.*, Penerbitan Lembaga Kajian Pasar Modal Dan Keuangan., Fakultas Hukum Universitas Indonesia., Jakarta., 2006.
- Tjager, I Nyoman, *Corporate Governance: tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis indoensia.*, PT Prenhallindo., Jakarta., 2003.
- Ujiyantho, Arief, Muh., Dam Pramuka, Agus, Bambang., , *Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba Dan Kinerja Keuangan.*, Simposium Nasional Akuntansi X., 2007.